

**ANALISIS TINGKAT EKONOMIS, EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REALISASI
ANGGARAN BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA
KEUANGAN BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

TESIS



Diajukan oleh

MUKHAMAD FAHRUDIN

151302820

**Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2017**

**ANALISIS TINGKAT EKONOMIS, EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REALISASI
ANGGARAN BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA
KEUANGAN BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh

MUKHAMAD FAHRUDIN

151302820

**Kepada
MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHAMAD FAHRUDIN

NIM : 151302820

Program Studi : Manajemen Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis kami yang berjudul:

ANALISIS TINGKAT EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN

BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN

BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO

Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Oktober 2017

Yang Menyatakan

MUKHAMAD FAHRUDIN

NIM. 151302820

TESIS

**ANALISIS TINGKAT EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN
BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
BLUD PUSKESMAS SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

Diajukan oleh:

MUKHAMAD FAHRUDIN

NIM: 151302820

Tesis ini telah di pertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal :14 Oktober 2017

Dosen Penguji 1

Dra. Sulastiningsih, M.Si

Dosen Pembimbing I

Dosen Penguji II/Pembimbing

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA. Ak

Drs. Muda Setia Hamid, MM, Ak

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar magister

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Mengetahui,

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
DIREKTUR**

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul Analisis Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Dalam penyusunan tesis penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Ketua STIE dan Direktur Program Magister Manajemen Widya Wiwaha yang telah memberikan kesempatan untuk belajar pada program pasca sarjana magister manajemen
2. Drs. Muda Setia Hamid, MM. Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pembimbingan, pengarahan dan motivasinya dalam penyelesaian tesis ini.
3. drg. Rina Sesotyawaty S. MPH selaku Direktur BLUD Puskesmas Sukoharjo yang telah memberikan izin penelitian serta berbagai fasilitas kepada penulis selama menyelesaikan penelitian ini.
4. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, meskipun belum sempurna, penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis pribadi.

Yogyakarta, Oktober 2017

Penulis

Mukhamad Fahrudin
151302820

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRACT

This study aims to determine (1) budget realization in BLUD Puskesmas Sukoharjo has been implemented economically (2) budget realization in BLUD Puskesmas Sukoharjo has been implemented efficiently (3) budget realization in BLUD Puskesmas Sukoharjo has been implemented effectively.

Location of study in this research is at BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo which is located at Jalan Banjarsari Sukoharjo Village Sukoharjo Sub-district Wonosobo Regency 56363. Method of collecting data using documentation. While the method of data analysis used is descriptive quantitative analysis method. Performance measurement using value for money analysis.

The results of the research can be concluded as follows: (1) Budget realization in BLUD Puskesmas Sukoharjo is less economical indicated by economic ratio calculation result, for example in 2015 economic ratio of employee expense 97,5%, goods and service expenditure 92,5 %, capital expenditure of 95.2%. In 2016, the ratio of employee expenditure was 99.8%, goods and services expenditure was 91.1%, capital expenditure was 87.4%. (2) The budget realization in BLUD Puskesmas Sukoharjo is less efficient as shown by efficiency ratio calculation, among others, in 2015 89.1% and in 2016 96.2%. (3) The budget realization in BLUD Puskesmas Sukoharjo is very effective which is shown by the calculation of effectiveness ratio in 2015 of 104.8% and in 2016 is 107.1%. However, when viewed per service, there is still a less effective effective and ineffective effectiveness ratio, in 2015 general public services of 67.1%, hirth service at 65.3%, and ANC BPJS service 12.3%. By 2016, bridal examination service is 84,4%, general delivery service is 85,6%, service of ANC BPJS is 50,8%.

The financial performance of BLUD Puskesmas Sukoharjo is poor. The calculation results show 2 (two) of 3 (three) ratio shows poor result. The ratio is the ratio of economics and the ratio of efficiency, while the ratio that shows good results is the ratio of effectiveness. Suggestions that can be given based on these concludes are BLUD Puskesmas Sukoharjo should be able to save the expenses incurred so that the performance in terms of economical can be improved. BLUD Puskesmas Sukoharjo is expected to produce certain outputs with certain inputs so that their efficiency can be improved. BLUD Puskesmas Sukoharjo is expected to produce output in accordance with the target so that its effectiveness can be improved.

Keywords: Value for Money, Financial Performance

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur karya ini akan ku persembahkan untuk:

1. Orang tua yang selalu memberikan dukungan berupa moril dan materiil
2. Istri dan anakku yang menjadi motivasi dalam hidup
3. Sahabat-sahabatku serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatu penyelesaian tesis ini.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Pertanyaan penelitian	7
D. Tujuan penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Anggaran	9
1. Pengertian Anggaran Publik	9
2. Tujuan dan Karakteristik Anggaran sektor Publik	11
3. Fungsi Anggaran Sektor Publik	12
4. Jenis-jenis Anggaran sektor Publik	14
5. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik	14
6. <i>Good Governance</i>	15
B. Kinerja	20
1. Konsep Kinerja	20
2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja	22
3. Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik	22

	4. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik	24
	C. <i>Value For Money</i>	27
	1. Konsep <i>Value for Money</i>	27
	2. Elemen-elemen <i>Value for Money</i>	28
	3. Indikator Kinerja dalam <i>Value for Money</i>	34
	4. Langkah-langkah Pengukuran <i>Value for Money</i>	35
	D. Penelitian yang Relevan	37
	E. Kerangka Konseptual	41
BAB III	METODE PENELITIAN	42
	A. Rancangan/Disain Penelitian	42
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
	C. Objek Penelitian	43
	D. Metode Pengumpulan Data	43
	E. Metode Analisis Data	43
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	46
	A. Hasil Penelitian	46
	1. Gambaran umum Penelitian	46
	B. Pembahasan	55
	1. Hasil Penelitian	55
	2. Pembahasan	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk menurut Desa di Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016	49
Tabel 4.2	Daftar Ketenagaan BLUD Puskesmas Sukoharjo	52
Tabel 4.3	Rasio Ekonomi BLUD Puskesmas Suoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 dan 2016	56
Tabel 4.4	Perbandingan Rasio Ekonomi Anggaran 2015-2016	56
Tabel 4.5	Rasio Efisiensi BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tahun 2015 dan Tahun 2016	57
Tabel 4.6	Rasio Efektivitas BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015	59
Tabel 4.7	Rasio Efektivitas BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2016	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Value For Money Chain</i>	29
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo	47

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Wikipedia Indonesia (2016: 1) Organisasi merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Globalisasi memunculkan tantangan dan persaingan yang semakin ketat pada setiap organisasi, baik itu organisasi swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik juga dituntut untuk mampu bersaing dengan pihak swasta. Organisasi sektor swasta memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan publik. Setiap organisasi harus memiliki rencana-rencana yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya. Rencana yang disusun untuk mencapai tujuan dari masing-masing organisasi tersebut dituangkan dalam rencana kerja yang disebut dengan anggaran.

Badan layanan umum daerah atau disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Standar pelayanan minimum merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.

Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo merupakan pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerja puskesmas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor - tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih maju dan sejahtera dan untuk mewujudkan *good goverment* dan *clean goverment*, maka puskesmas berubah dari UPTD menjadi unit pelayanan fungsional di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

Pada tahun 2015, Puskesmas menerapkan PPK BLUD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut juga ditujukan guna merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahwa sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan melaksanakan Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut akan bertumpu kepada fasilitas kesehatan primer maupun sekunder. Agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan profesional,

maka Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo harus dikelola secara profesional. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, benefit, dan *cost* harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Agar dalam pengelolaan Puskesmas dapat fleksibel dan responsif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula dalam ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Salah satu hal terpenting dalam menjalankan sebuah organisasi adalah anggaran. Menurut Mahsun (2013: 145), Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Anggaran pada BLUD Puskesmas Sukoharjo terdiri atas anggaran pendapatan BLUD Puskesmas Sukoharjo dan Anggaran Belanja Langsung BLUD Puskesmas Sukoharjo. Proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, organisasi publik harus menerapkan prinsip-prinsip diantaranya, akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban publik agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah

setempat sehingga nantinya kinerja keuangan organisasi publik tersebut akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi, (Mahsun, 2013: 25). Kinerja keuangan puskesmas dapat dicapai melalui aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Aspek ekonomis menekankan realisasi pengeluaran lebih kecil dari anggarannya. Aspek efisiensi menekankan output yang dihasilkan lebih besar dari input, dan aspek efektivitas menekankan realisasi pendapatan lebih besar dari anggarannya. Sebuah kinerja pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan perbaikan di masa depan. Kinerja keuangan Puskesmas Sukoharjo merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab keuangan negara.

Kinerja pada BLUD Puskesmas Sukoharjo juga dapat dilihat dari keakuntabilisan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Salah satu laporan pertanggungjawaban BLUD Puskesmas Sukoharjo kabupaten Wonosobo yang bersifat finansial yaitu laporan keuangan masih kurang baik. Hal tersebut karena perbedaan persepsi mengenai format pelaporan antara puskesmas satu dengan yang lainnya. Hal ini berimbas pada hasil laporan

keuangan yang tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maupun Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain permasalahan di atas, penilaian kinerja oleh Badan Pengawas Keuangan terhadap PPK – BLUD Puskesmas di Kabupaten Wonosobo belum menyeluruh. Metode penilaian yang dilakukan menggunakan sampel. Penilaian kinerja keuangan tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 BLUD Puskesmas Kejajar Kabupaten Wonosobo yang ditunjuk menjadi sampel penilaian kinerja keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan. Hal ini menyebabkan belum diukurnya kinerja keuangan BLUD Puskesmas lain di Kabupaten Wonosobo begitu pula dengan BLUD Puskesmas Sukoharjo. Dampak dari kebijakan tersebut membuat BLUD Puskesmas Sukoharjo tidak melakukan pengukuran kinerja keuangan sehingga menyebabkan pengelolaan anggaran belum sesuai yang seharusnya.

Tuntutan akan kualitas profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *value for money* (nilai daripada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Mardiasmo, 2009:4).

Value for money dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Menurut

Peraturan Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan keuangan Negara Pasal 1 ayat 6 menyebutkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Memperhatikan makna dari peraturan tersebut, konsep *value for money* merupakan salah satu elemen penilaian kinerja keuangan karena dalam konsep *value for money* diperhitungkan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektifitas yang merupakan bagian dari peraturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterapkan pada Puskesmas di Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2015. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tata kelola *good governance*. Dalam kegiatannya, BLUD harus menyusun anggaran baik pendapatan maupun belanja. Penilaian kinerja BLUD ditekankan pada penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang disajikan pada setiap bulan, triwulan dan semester. Permasalahan yang ada adalah belum dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Wonosobo. Penilaian kinerja keuangan BLUD Puskesmas pada tahun 2015 dan tahun 2016 dilaksanakan dengan melakukan *sampling* dan BLUD Puskesmas Kejajar yang ditunjuk menjadi sampel penilaian sedangkan BLUD Puskesmas Sukoharjo Belum

dilaksanakan penilaian kinerja keuangan sehingga kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo belum Optimal.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka untuk mengetahui kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo, dalam studi kasus ini, penulis ingin melakukan analisis tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo menggunakan pendekatan *Value For Money* sebagai upaya peningkatan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo telah dilaksanakan secara ekonomis?
2. Apakah realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo telah dilaksanakan secara efisien?
3. Apakah realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo telah dilaksanakan secara efektif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo telah dilaksanakan secara ekonomis

2. Untuk mengetahui realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo telah dilaksanakan secara efisien
3. Untuk mengetahui realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo telah dilaksanakan secara efektif

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang keuangan daerah serta mencoba menerapkan konsep *value for money* yang mana hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan tentang tata kelola atau pengelolaan keuangan yang baik.
2. Temuan ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis yaitu memberikan manfaat dan masukan bagi individu di BLUD Puskesmas Sukoharjo di masing-masing bagian mengenai pengelolaan keuangan sehingga nantinya penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja di BLUD Puskesmas Sukoharjo serta digunakan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anggaran

1. Pengertian Anggaran Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan dan lebih kongkret. (Mahsun, 2013: 145).
- b. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009: 61).
- c. Anggaran pada hakekatnya dapat didefinisikan sebagai bentuk laporan yang disusun secara sistematis yang berisikan tentang rencana-rencana kegiatan yang dinilai dengan keuangan periode waktu tertentu di masa yang akan datang. (Ngadirin, 2011: 1)

- d. Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. (Sugijanto dkk, 1995: 22)
- e. Anggaran sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. (Bastian, 2006: 163)
- f. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. (Halim, 2016: 48)

Berdasarkan definisi di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar dari masing-masing definisi tersebut. Persamaannya ialah sama-sama menyatakan bahwa anggaran adalah untuk periode waktu tertentu dimasa mendatang. Perbedaan mendasar dari definisi tersebut adalah lingkup dari isi anggaran.

Anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi yang meliputi informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan aktivitas. (Ulum, 2008: 98).

Menurut Francisca (2010: 21), anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- a. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran biaya)
- b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi (Mardiasmo, 2009: 61):

- a. Aspek perencanaan
- b. Aspek pengendalian
- c. Aspek akuntabilitas publik

2. Tujuan dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Halim (2016: 50), anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi dan tujuan dari anggaran sektor publik tersebut, maka anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah atau panjang.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

3. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Fungsi anggaran sektor publik antara lain (Mardiasmo, 2009: 63):

- a. Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

- b. Sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

- c. Sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

- d. Sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk menentukan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif

dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

- e. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

- f.. Sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutid kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan capaian anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

- g. Sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

- h. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

4. Jenis-jenis Anggaran Sekotr Publik

Jenis anggaran publik ialah (Mardiasmo, 2009: 66):

a. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan

b. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rancana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya.

5. Prinsip-prinsip Anggaran Publik

Prinsip-prinsip anggaran publik adalah (Mardiasmo, 2009: 67):

a. Otoritas oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut

b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

c. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

d. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan

h. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

6. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Menurut *World Bank* sebagaimana dikutip dalam Mardiasmo (2009: 17) mendefinisikan *governance*

sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resource for development of society*”. Sementara itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintahan mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

b. Karakteristik *Good Governance*

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1) Participation

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) Rule of law

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

3) Transparency

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Resposiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consenses orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectivenes*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Stategic vision*

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan

Dari kesembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilita publik, dan *value for money* (*economic, efficiency Idan effectiveness*). Untuk mewujudkan *good public* ada *corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi

sektor publik (*public sector reform*). Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Demi mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*Institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain informasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a) Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
- b) Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
- c) Reformasi Sistem Penarikan (*audit reform*)
- d) Reformasi Sistem Manajemen Keuangan (*financial management reform*)

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Sebagai

contoh laporan keuangan tersebut harus disajikan anggarannya dalam media massa.

B. Kinerja

1. Konsep Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2013: 25). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Dessler (1992, dalam Samsudin, 2006: 159) mengatakan bahwa kinerja sama halnya dengan prestasi kerja. Dimana prestasi kerja adalah perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan, jadi dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerjanya. Sedangkan menurut Cooper (1995 dalam Samsudin, 2006: 159) prestasi kerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dicapai oleh seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1: 37) menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah

keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja (*performance measurment*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Robertson, 2002 dalam Mahsun, 2013: 25). Sementara menurut Lohman (2003, dalam Mahsun, 2013: 25) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (2000, dalam Mahsun, 2013: 25) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Dapat disimpulkan, kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan menurut ukuran atau standar yang telah ditentukan dan diberlakukan untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
- b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
- d. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

(Mahsun, 2013: 26)

3. Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya efisiensi dan juga tidak hanya ukuran finansial. Menurut Muhamad Mahsun (2013: 31), pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

- a. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

- b. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- c. Kelompok keularan (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*).
- d. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
- e. Kelompok manfaat (*benefit*); adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
- f. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan aspek-aspek kinerja yang harus diukur pada sektor publik tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan pengukuran kinerja sektor publik ini. Menurut BPKP (2000 dalam Mahsun, 2013: 33) cakupan pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup item-item sebagai berikut:

- a. Kebijakan (*policy*) untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan
- b. Perencanaan dan penganggaran (*planning and budgeting*): untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana.

- c. Kualitas (*quality*): untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi
- d. Kehematan (*economy*): untuk me-review pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya
- e. Keadilan (*equity*): untuk menyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
- f. Pertanggungjawaban (*accountability*): untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

4. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009: 122), tujuan sistem pengukuran kinerja adalah

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007: 14), tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi adalah:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
- c. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya
- d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja sangat bermanfaat untuk membantu manajerial keorganisasian (Mahsun, 2013: 33). Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi publik (BPKP, 2000 dalam Mahsun, 2013: 33):

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
- d. Memberikann penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

- e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 122), manfaat pengukuran kinerja adalah:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.

- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009: 121)

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

C. Value for Money

1. Konsep value for money

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik

memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Mardiasmo, 2009:4). Menurut Abdul Halim (2016: 128), konsep *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi.

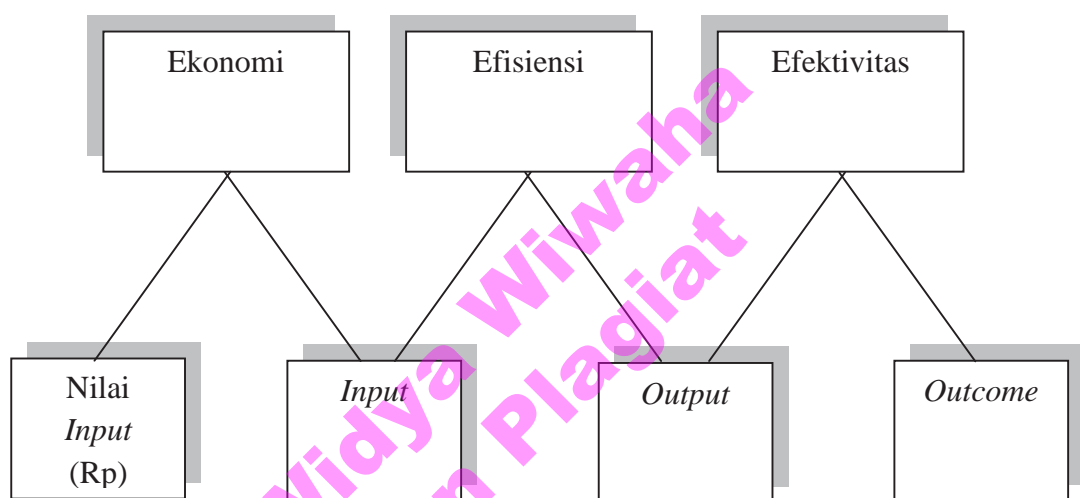
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome*. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity dan service coverage*). Permasalahn yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* dibangun atas tiga komponen utama (Mahmudi, 2007:93) yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen misi, visi, tujuan, sasaran dan target
- b. Komponen *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*
- c. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

2. Elemen-elemen *value for money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama. Secara skematis, *value for money* dapat dilihat pada gambar 1 dengan penjelasan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Value for Money Chain

(Mardiasmo, 2009:5)

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi-organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*) atau harga yang mendekati pasar. Ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya *input* tidak terjadi pemborosan. (Mardiasmo, 2009: 131)

Mahmudi (2007: 81) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dengan input primer (kas).

Menurut Mardiasmo (2009: 133), pengukuran ekonomi berhubungan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- 2) Apakah biaya organisasi lebih besar dari biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?

3) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya keuntungannya secara optimal?

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Konsep efisiensi merupakan konsep yang bersifat relatif atau tidak absolut. (Mardiasmo, 2009: 132)

Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2007: 81). Menurut Abdul Halim (2006: 129), dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu (a) efisiensi alokasi (efisiensi 1) dan (b) efisiensi teknis atau manajerial (efisiensi 2)

c. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas

merupakan perbandingan *outcome* dengan output. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Karena *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasikan, maka pengukuran efektivitas sering mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) tidak bisa diketahui dalam jangka pendek akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir sehingga ukuran efektivitas biasanya dapat dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgement*). (Mardiasmo, 2009: 132)

Sedangkan menurut Abdul Halim (2016: 130), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost outcome*).

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. (Mardiasmo, 2009: 4)

Tingkat *input*, *output*, dan *outcome* harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada penilaian kinerja berdasarkan *value for money*. Tahap pertama organisasi harus membuat indikator *input*, *output* dan *outcome*. Kemudian tahap berikutnya adalah pengukuran *input*, *output*, dan *outcome*. Indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian kinerja, tujuan, visi dan misi organisasi. Konsep dasar *input*, *output* dan *outcome*, yaitu sebagai berikut: (Mardiasmo, 2009: 5)

1) *Input*

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh *input* diantaranya seperti dokter rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah dan sebagainya. *Input* dapat dinyatakan

secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru, dan sebagainya. *Input* dapat pula dinyatakan dengan nilai uang, misalnya biaya dokter, harga tanah, gaji guru dan sebagainya. Masalah yang terjadi dalam *input* adalah pada metode penentuan harga.

2) *Output*

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Ukuran *Output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Mengukur *output* lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, keamanan atau kesehatan.

3) *Outcome*

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang dikehendaki.

3. Indikator Kinerja dalam *Value for Money*

Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator sebagai dasar penilaian

kinerja. Mekanisme untuk menentukan kinerja tersebut memerlukan hal-hal berikut: (Mardiasmo, 2009: 128)

- 1) Sistem perencanaan dan pengendalian
- 2) Spesifikasi teknis dan standarisasi
- 3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
- 4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
- 5) Mekanisme sumber daya manusia

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran *value for money* organisasi adalah bagaimana membandingkan *input* dengan *output* untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika *output* yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan *input* finansial (biaya) dengan *output* (nonfinansial), misalnya biaya unit (*unit cost statistic*). *unit cost statistic* tersebut dapat digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unti-unit kerja pemerintah dapat menghasilkan sejumlah *unit cost statistic* yang spesifik untuk unit kerjanya.

4. Langkah-langkah Pengukuran *Value for Money*

Langkah-langkah pengukuran *value for money* diantaranya: (Mardiasmo, 2009: 133)

1) Pengukuran ekonomi

Pada pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:

- a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b) Apakah biaya organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?
- c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

2) Pengukuran efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3) Pengukuran efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi

melebihi apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pengukuran *outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada *output*, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan (Smicth, 1996 dalam Mardiasmo, 2009: 134). Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan peran prospektif.

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Anas (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *pusposive sampling* dan *snowball sampling*. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode serta dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data model interaktif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa secara umum program PKMS berjalan dengan baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain adanya

penduduk siluman yang dengan mudah mendapat KTP Surakarta karena kurangnya pengawasan administratif. Kurang maksimalnya pelayanan kesehatan karena sumber daya manusia terbatas dan pelaksanaan program yang kurang efektif karena terkonsentrasi pada pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dilingkungan Dinas Kesehatan. Perbedaannya adalah waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Surakarta tahun 2009 sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Wonosobo tahun 2016. Analisis kinerja yang diteliti pada penelitian penulis merupakan analisis kinerja keuangan pada BLUD Puskesmas Sukoharjo.

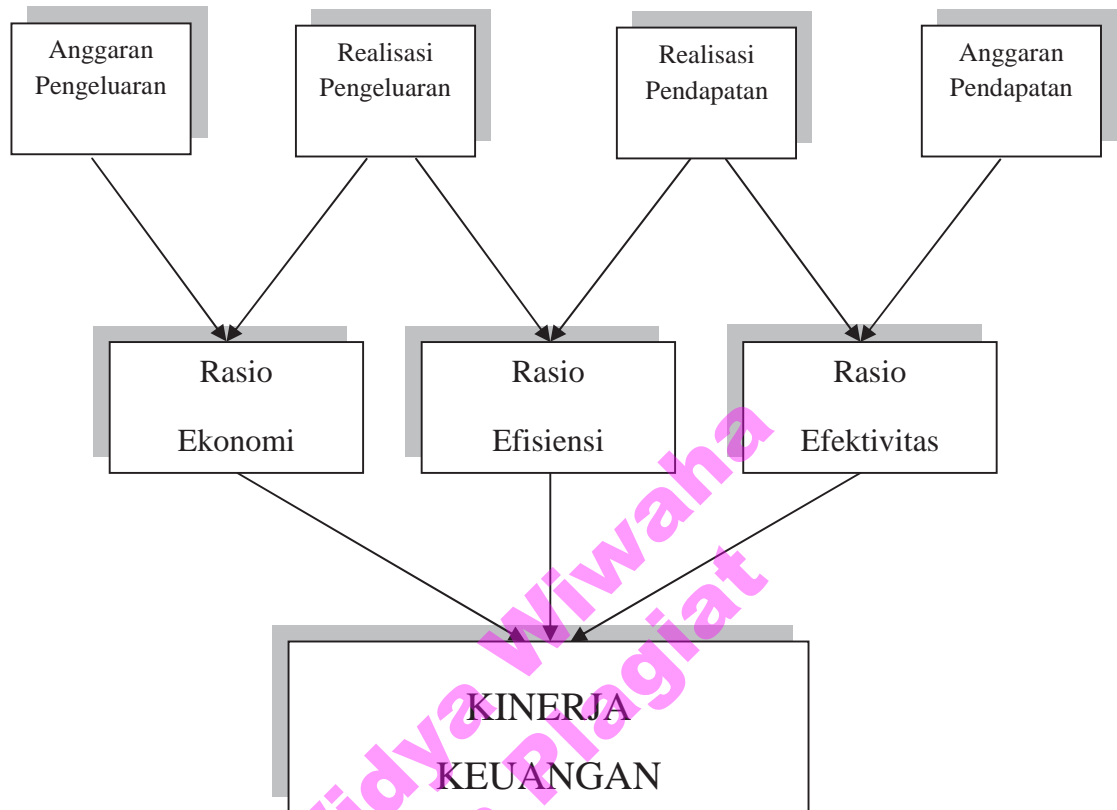
2. Penelitian yang dilakukan oleh Francisca Erni Dwi Pamungkas (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Puskesmas Studi pada Puskesmas Danurejan I Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan data *time series* pada periode 2007-2009. Teknik pengukuran menggunakan teknik pengukuran *value for money* dan analisis regresi untuk menjelaskan subsidi pemerintah dengan kinerja Puskesmas Danurejan I Yogyakarta. Hasil analisis data menunjukkan: 1) melalui analisis deskriptif, puskesmas sudah mengelola anggaran secara baik dilihat dari tingkat ekonomis dan efektivitasnya, namun terdapat ketidakefisienan karena subsidi pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan puskesmas 2) melalui analisis regresi, puskesmas tidak mampu mengoptimalkan pelayanannya karena persediaan obat serta alat dan

bahan kesehatan tidak signifikan tetapi puskesmas mampu mengoptimalkan layanan melalui persediaan alat dan bahan gigi serta laboratorium yang signifikan. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penggunaan teknik pengukuran *value for money* untuk menilai kinerja keuangan. Perbedaannya adalah waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Danurejan 1 Yogyakarta sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di BLUD Puskesmas Sukoharjo Wonosobo dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya PPK BLUD.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Demi Aulia Arfan (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode tahun 2011 – 2012”. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dari tiga program yang dianalisis yaitu Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian menunjukkan bahwa, (1) dari elemen ekonomi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu menyelenggarakan seluruh program secara ekonomis dengan penghematan pada tahun 2011 masing-masing Rp141.626.730,00, Rp.67.823.730,00 dan Rp.54.412.810,00, dan pada tahun 2012 masing-masing Rp.26.809.810,00, Rp.38.848.800,00, Rp.15.386.400,00; 2) dari

elemen efisiensi dapat diketahui periode tahun 2011 dan 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan seluruh program secara efisien dengan rasio efisiensi pada tahun 2011 masing-masing 121,1%, 103,44% dan 110,56%, dan pada tahun 2012 yaitu 110,98%, 106,03% dan 102,88%; (3) dari elemen efektivitas dapat diketahui periode tahun 2011 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mampu menyelenggarakan dua program secara efektif dengan rasio efektivitas sebesar 100% dan satu program kurang efektif yaitu pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan rasio efektivitas 99,29%, sedangkan periode tahun 2012 Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan ketiga program secara efektif dengan rasio efektivitas pada setiap program mencapai 100%. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penggunaan teknik pengukuran *value for money* untuk menilai kinerja keuangan. Perbedaannya adalah waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di BLUD Puskesmas Sukoharjo Wonosobo.

E. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan/ Disain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu semua informasi diwujudkan dalam angka dan dianalisis berdasarkan analisis rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, penelitian ini bersifat *expost facto*. Penelitian *expost facto* adalah penelitian yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan (Suharsimi Arikunto, 2010: 17).

Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan (Mardiasmo, 2009: 4).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dinas Kesehatan khususnya pada BLUD Puskesmas Sukoharjo yang terletak di jalan Banjar Sari Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2013:100). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas pada pelaksanaan realisasi anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2015 dan tahun 2016.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, 2013: 201). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui

konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan (Mahsun: 2013) adalah sebagai berikut:

a. Rasio Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya.

Rasio ekonomi menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Dimana rasio ekonomi merupakan perbandingan antara pengeluaran instansi dengan anggaran yang ditetapkan. Apabila kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan tidak ekonomis, 90% - 100% adalah kurang ekonomis, 80% - 90% adalah cukup ekonomis, 60% - 80% adalah ekonomis dan dibawah dari 60% adalah sangat ekonomis (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007: 25). Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Pengeluaran Instansi}}{\text{Anggaran Di Tetapkan}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Mengukur tingkat *input* dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data pendapatan.

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Apabila kinerja keuangan diatas

100% dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% adalah kurang efisien, 80%-90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007: 26). Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran dalam rangka memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas

Mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Nilai efektifitas diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007: 27). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100 % adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

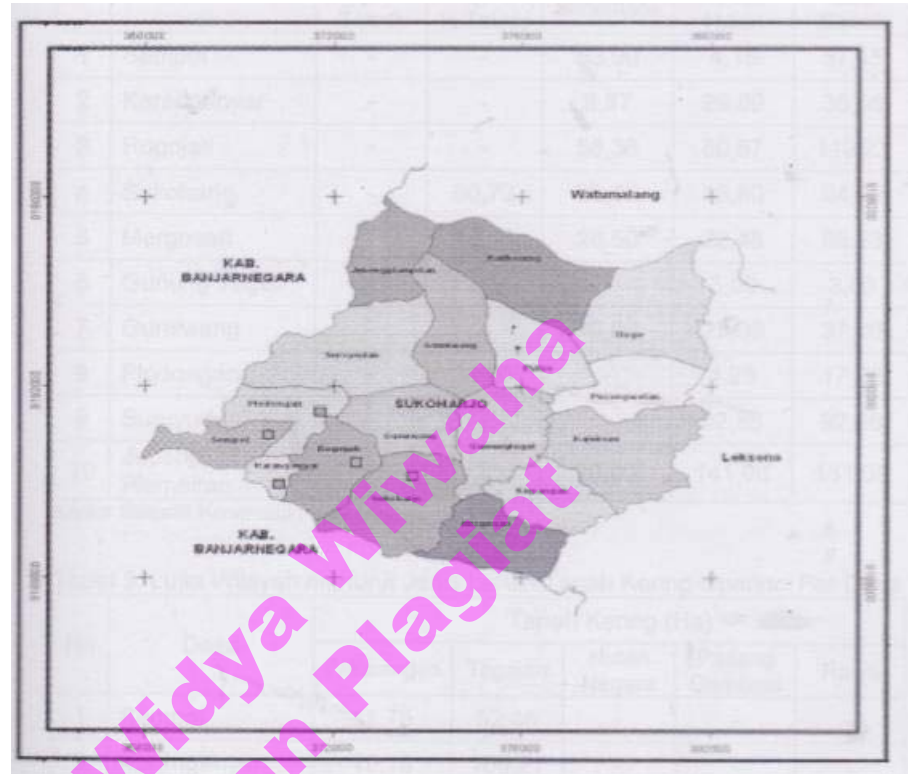
a. Dasar Hukum Pendirian Puskesmas

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Di dalam Permenkes No. 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, dalam kondisi tertentu, pada 1 kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 puskesmas, yang mana kondisi tertentu yang dimaksud ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan pada Permenkes No. 75 Tahun 2014, antara lain : persyaratan lokasi, persyaratan bangunan, prasarana, ketersediaan peralatan kesehatan dan ketenagaan.

b. Kondisi Wilayah Kerja BLUD Puskesmas Sukoharjo

1) Keadaan Geografis



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

Secara geografis Kecamatan Sukoharjo terletak antara $7^{\circ} 20' 08''$ sampai $7^{\circ} 24' 56''$ Lintang Selatan (LS), dan $109^{\circ} 45' 11''$ sampai $109^{\circ} 51' 40''$ Bujur Timur (BT). Kecamatan Sukoharjo berjarak 17 km dari Kabupaten Wonosobo dan 143 km Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Merupakan kecamatan baru pemecahan dari kecamatan Leksono dan telah berumur 16 tahun pada tanggal 24 Juli 2016.

Luas kecamatan Sukoharjo adalah 5.705,97 ha atau 6% dari luas kabupaten Wonosobo, dengan komposisi tata guna lahan

atas tanah sawah mencakup 1.052,383 ha (18%), tanah kering seluas 4.376,16 ha (82%), hutan negara seluas 849,79 ha (15%), perkebunan negara/swasta seluas 8,3 ha dan lainnya seluas 130,86 ha. Dengan tata guna lahan tersebut mayoritas lahan ditanami salak dan albasia.

Kecamatan Sukoharjo beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata suhu udara di Kecamatan Sukoharjo pada siang hari berkisar antara 25-26° C. Dengan curah hujan > 100 mm/bln selama 10 bulan, bulan lembab (curah hujan 60-100 mm/bln) selama 1 bulan dan bulan kering (curah hujan < 60 mm/bln) selama 1 bulan dengan kelembaban udara rata-rata 41,38%.

2) Keadaan Penduduk

a) Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukoharjo Tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2016 adalah 34.409 jiwa, yang terdiri dari 17.683 laki-laki dan 16.725 perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 789 jiwa per Km².

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Sukoharjo tahun 2016

NO	DESA	L	P	JUMLAH
1	Tlogo	2011	1888	3.899
2	Pucungwetan	1175	1104	2.279
3	P u l u s	470	473	943
4	Kalibening	1248	1152	2.400
5	Garunglor	1071	1051	2.122
6	Kajeksan	828	788	1.616
7	Kupangan	456	421	877
8	Sukoharjo	2191	2032	4.223
9	Mergosari	1113	1036	2.149
10	Rogojati	1034	993	2.027
11	Karanganyar	785	650	1.435
12	Sempol	665	667	1.332
13	Plodongan	873	804	1.677
14	Suroyudan	1236	1157	2.393
15	Gumiwang	630	618	1.248
16	Jebeng Plampitan	953	894	1.847
17	Gunung Tugel	945	997	1.942
	JUMLAH	17.683	16.725	34.409

b) Sex Ratio Penduduk

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Sukoharjo tahun 2016, rata-rata rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 106,0396 hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

c) Keadaan Sosial Ekonomi**• Angka Beban Tanggungan**

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur, maka angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar 55,41, mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 sebesar 56,5. Artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 orang penduduk usia tidak produktif.

• Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat berkaitan dengan kemampuan menyerap dan menerima informasi kesehatan serta kemampuan dalam berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Angka melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2016 adalah 90,15 %.

d) Pembiayaan Kesehatan Bersumber Dari Pemerintah

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan di BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tahun 2016 sebesar Rp. 1.567.698.940.- yang terdiri dari Pendapatan BLUD Rp. 392.833.940.-, Dana Kapitasi BPJS Rp. 874.865.000.-, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp. 300.000.000.-.

c. Keadaan Sumber Daya BLUD Puskesmas Sukoharjo**1) Sarana Pelayanan Kesehatan**

Puskesmas Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 2 unit Puskesmas yaitu Puskesmas Sukoharjo I dan Puskesmas Sukoharjo II. Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Sukoharjo terdapat 4 puskesmas pembantu dan 11 Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).

Pada tahun 2016, Puskesmas Sukoharjo I mendapat bantuan berupa bangunan untuk rawat inap. Namun pelaksanaan pelayanan rawat inap dimulai pada tahun 2017 dikarenakan ijin operasional rawat inap dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada bulan April 2017.

2) Tenaga Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi 34.409 jiwa penduduk pada tahun 2016 di wilayah Kecamatan Sukoharjo, masing-masing unit pelayanan didukung oleh tenaga kesehatan medis maupun non medis meliputi:

Tabel 4.2. Daftar Ketenagaan BLUD Puskesmas Sukoharjo

No	Profesi	Puskesmas Sukoharjo I	Puskesmas Sukoharjo II
1	Dokter Umum	1	1
2	Dokter Gigi	1	0
3	Perawat	5	4
4	Perawat Gigi	1	1
5	Bidan	10	8
6	Gizi	1	0
7	Analisis Laboratorium	1	0
8	Sanitarian	0	1
9	Asisten Farmasi	1	0
10	Administrasi	5	3
11	Cleaning Service	1	1

Untuk mendukung pelayanan rawat inap pada tahun 2017, Puskesmas Sukoharjo I mengadakan rekrutmen tenaga BLUD yang terdiri dari 1 orang Dokter Umum, 3 orang Perawat, 2 orang Bidan, 1 orang Cleaning Service.

d. Visi dan Misi BLUD Puskesmas Sukoharjo

1) Visi

Visi Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo adalah menjadi institusi pengelola pelayanan kesehatan primer terbaik di Indonesia.

Penetapan Visi tersebut tidak lepas dari peran Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo sebagai sarana pelayanan kesehatan primer. Untuk dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sehat maka diperlukan sebuah

perencanaan yang matang agar hambatan dan kendala dapat diatasi dengan baik.

Visi Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yang telah menjadi komitmen tersebut diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan inspirasi untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan. Di samping itu, visi tersebut dapat menjadi pedoman untuk bertindak dan mampu memberdayakan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta menjadi semakin konkrit pada saat dijabarkan lebih lanjut menjadi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut :

- a) Memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.

Puskesmas selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang

sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan.

- b) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.

Puskesmas selalu berupaya setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya semakin berdaya di bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat.

- c) Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan.

Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.

- d) Menyediakan Data Kesehatan.

Puskesmas menyediakan data kesehatan yang meliputi data upaya kesehatan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

e. Maksud dan Tujuan Penerapan PPK-BLUD

Maksud dan tujuan penerapan PPK-BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 2) Puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif.
- 3) Puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
- 4) Puskesmas bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai.

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi

Kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika mampu menghilangkan atau mengurangi munculnya biaya-biaya yang tidak perlu. Semakin kecil nilai rasio ekonomis, maka semakin baik kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dalam penggunaan dan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Rasio Ekonomi BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Rasio Ekonomi BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomi
2015	Belanja Pegawai	70.509.260	68.730.107	97,5%
	Belanja Barang dan Jasa	967.409.740	894.484.783	92,5%
	Belanja Modal	51.500.000	49.032.500	95,2%
	Total Belanja	1.089.419.000	1.012.247.390	92,9%
2016	Belanja Pegawai	138.487.320	138.247.320	99,8%
	Belanja Barang dan Jasa	1.059.817.120	964.989.898	91,1%
	Belanja Modal	69.394.500	60.617.727	87,4%
	Total Belanja	1.267.698.940	1.163.854.945	91,8%
	Rata-rata	589.279.485	544.025.584	93,5%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo 2015-2016

Rasio ekonomi pada tiap jenis belanja mengacu pada Tabel 4.3 dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perbandingan Rasio Ekonomi Tahun Anggaran 2015-2016

No	Jenis Belanja	Rasio Ekonomi		Keterangan
		2015	2016	
1	Belanja Pegawai	97,5%	99,8%	Naik Sebesar 2,3%
2	Belanja Barang dan Jasa	92,5%	91,1%	Turun Sebesar 1,4%
3	Belanja Modal	95,2%	87,4%	Turun sebesar 7,9%
	Total Belanja	92,9%	91,8%	Turun sebesar 1,1%

Rasio ekonomi pada BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat ekonomis BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten

Wonosobo tahun 2015 pada belanja pegawai sebesar 97,5% sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi 99,8%. Rasio ekonomis belanja barang dan jasa menurun dari 92,5% di tahun 2015 menjadi 91,1% di tahun 2016. Rasio ekonomis belanja modal menurun dari 95,2% di tahun 2015 menjadi 87,4% di tahun 2016. Rasio ekonomis total belanja menurun dari 92,9% di tahun 2015 menjadi 91,8% di tahun 2016.

b. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah <1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Rasio efisiensi BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Rasio Efisiensi BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2015	1.012.247.390	1.136.044.866	89,1%
2016	1.163.854.945	1.210.320.032	96,2%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 dan 2016

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BLUD Puskesmas Sukoharjo pada tahun 2015 adalah sebesar 89,1%. Kemudian pada tahun 2016 tingkat efisiensi naik menjadi 96,2%. Tingkat efisiensi ini dikatakan tidak bagus karena mengalami kenaikan sebesar 7,1%.

c. Hasil perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Karena *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantitaskan, sehingga ukuran efektivitas dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgement*).

Pada BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo *output* yang dihasilkan lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) dan tidak dapat dikuantitaskan. Berikut perhitungan rasio efektivitas untuk tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.6. Rasio Efektivitas BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

Tahun	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2015	Pendapatan Total	1.136.044.866	1.084.101.000	104,8%
	Pelayanan Rawat Jalan	101.450.000	99.150.000	102,3%
	Pelayanan Tindakan umum	40.313.500	28.250.000	142,7%
	Pelayanan kir Umum	5.030.000	7.500.000	67,1%
	pelayanan kir haji	490.000	750.000	65,3%
	Pelayanan pemeriksaan Capeng	6.160.000	6.600.000	93,3%
	Pelayanan persalinan umum	113.400.000	86.400.000	131,3%
	Pelayanan KB Umum	9.308.000	5.512.000	168,9%
	Kapitasi BPJS	813.331.000	797.544.000	102,0%
	Persalinan BPJS	37.915.000	36.000.000	105,3%
	ANC BPJS	1.185.000	9.600.000	12,3%
	PNC BPJS	1.745.000	4.500.000	38,8%
	KB BPJS	3.480.000	2.295.000	151,6%
	Jasa Giro	2.237.366	-	100,0%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.

Dari Tabel 4.6 di atas diketahui rasio efektivitas yang dihasilkan BLUD Puskesmas Sukoharjo pada tahun 2015 adalah sebesar 104,8%. Hasil ini merupakan hasil perhitungan total realisasi pendapatan dibandingkan dengan target pendapatan. Sedangkan hasil

perhitungan rasio efektivitas per pelayanan sendiri hampir seluruhnya mencapai angka diatas 90% kecuali untuk pelayanan kir umum hanya mencapai 67,1%, pelayanan kir haji sebesar 65,3% dan pelayanan ANC BPJS sebesar 12,3%.

Tabel 4.7 Rasio Efektivitas BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2016

Tahun	Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2016	Pendapatan Total	1.210.320.032	1.130.000.000	107,1%
	Pelayanan Rawat Jalan	97.440.000	99.500.000	97,9%
	Pelayanan Tindakan umum	44.974.000	25.628.000	175,5%
	Pelayanan kir Umum	4.430.000	4.300.000	103,0%
	pelayanan kir haji	840.000	880.000	95,5%
	Pelayanan pemeriksaan Capeng	5.400.000	6.400.000	84,4%
	Pelayanan persalinan umum	82.200.000	96.000.000	85,6%
	Pelayanan KB Umum	13.380.000	10.676.000	125,3%
	Kapitasi BPJS	874.865.000	816.420.000	107,2%
	Persalinan BPJS	56.995.000	48.000.000	118,7%
	ANC BPJS	5.792.500	11.400.000	50,8%
	PNC BPJS	5.992.500	6.000.000	99,9%
	KB BPJS	6.335.000	4.796.000	132,1%
	Laboratorium BPJS	7.365.000	0	100,0%
	Jasa Giro	4.311.032	0	100,0%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015.

Dari Tabel 4.7 di atas diketahui rasio efektivitas yang dihasilkan BLUD Puskesmas Sukoharjo pada tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami kenaikan 107,1%. Tingkat efektivitas ini mengalami kenaikan sebesar 2,3% dibanding 2015. Hasil perhitungan rasio efektivitas per pelayanan pada tahun 2016 sebagian besar mencapai angka diatas 90%, kecuali pada pelayanan pemeriksaan calon pengantin sebesar 84,4%, pelayanan persalinan umum 85,6%, pelayanan ANC BPJS 50,8%.

2. Pembahasan

a. Analisis Rasio Ekonomi

Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan rasio ekonomi, dimana rasio ekonomis dibagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Tingkat rasio ekonomis yang baik adalah terjadinya penurunan pada hasil perhitungan. Penurunan tingkat rasio ekonomis menggambarkan peningkatan kinerja, karena dengan adanya penurunan maka kegiatan operasional yang telah dilaksanakan mampu menghilangkan atau mengurangi munculnya biaya-biaya yang tidak perlu.

Kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dilihat dari segi rasio ekonomis dapat dikatakan baik. Hasil

penelitian pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari ketiga jenis belanja yang direalisasikan dua diantaranya mengalami penurunan, sedangkan yang mengalami kenaikan hanya 1 (satu) belanja. Rincian dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio ekonomis belanja pegawai pada tahun 2015 adalah sebesar 97,5% dan pada tahun 2016 menjadi 99,8%. Hasil 97,5% dan 99,8% masuk dalam kategori kurang ekonomis. Rasio ekonomis mengalami kenaikan sebesar 2,3%. Kenaikan sebesar 2,3% menunjukkan kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada belanja pegawai kurang baik. Naiknya rasio ekonomi berarti naik pula biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga terjadi pemborosan.
- 2) Rasio ekonomis belanja barang dan jasa pada tahun 2015 adalah sebesar 92,5% dan pada tahun 2016 turun menjadi 91,1%. Hasil 92,5% dan 91,1% masuk kategori kurang ekonomis. Rasio ekonomis mengalami penurunan sebesar 1,4%. Penurunan sebesar 1,4% menunjukkan kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada belanja barang dan jasa cukup baik. Turunnya rasio ekonomis berarti ada penghematan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan.
- 3) Rasio ekonomis belanja modal pada tahun 2015 adalah sebesar 95,2% dan pada tahun 2016 turun menjadi 87,4%. Hasil 95,2% dan 87,4% masuk dalam kategori kurang ekonomis. Rasio

ekonomis mengalami penurunan sebesar 7,9%. Penurunan sebesar 7,9% menunjukkan kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada belanja pegawai cukup baik. Turunnya rasio ekonomis berarti ada penghematan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan.

b. Analisis Rasio Efisiensi

Hasil penelitian terhadap rasio efisiensi pada BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ditunjukkan oleh Tabel 4.5. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 7,1% dimana di tahun 2015 rasio efisiensi menunjukkan angka sebesar 89,1% dan pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 96,2%. Kenaikan yang terjadi menunjukkan bahwa kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dilihat dari segi rasio efisiensi adalah kurang baik. Angka 89,1% masuk dalam kategori cukup efisien dan angka 96,2% masuk dalam kategori kurang efisien.

c. Analisis Rasio Efektivitas

Hasil penelitian terhadap rasio efektivitas pada BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ditunjukkan oleh Tabel 4.6 dan Tabel 4.7. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efektivitas mengalami kenaikan sebesar 2,3%, dimana pada tahun 2015 rasio

efektivitas menunjukkan angka sebesar 104,8% dan pada tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 107,1%. Angka 104,8% dan 107,1% masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini berarti efektivitas BLUD Puskesmas Sukoharjo mengalami kenaikan dan kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo dapat dikatakan sangat baik. Namun demikian, apabila dilihat dari hasil perhitungan per pelayanan, BLUD Puskesmas Sukoharjo memiliki pelayanan yang tingkat rasio efektivitasnya masih kurang efektif pada tahun 2015, antara lain: pelayanan kir umum sebesar 67,1%, pelayanan kir haji sebesar 65,3%, sedangkan pelayanan yang tingkat rasio efektivitasnya tidak efektif pada tahun 2015 yaitu pelayanan ANC BPJS sebesar 12,3%. Pada tahun 2016, pelayanan yang tingkat rasio efektivitasnya cukup efektif antara lain, pelayanan pemeriksaan calon pengantin sebesar 84,4%, pelayanan persalinan umum sebesar 85,6%, dan pelayanan dengan tingkat rasio efektivitasnya tidak efektif yaitu pelayanan ANC BPJS sebesar 50,8%.

Dilihat dari data di atas, terjadi kenaikan dan penurunan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo pada pelayanan yang sebelumnya belum menghasilkan tingkat efektivitas yang baik dilihat dari rasio efektivitas per pelayanan. Hal tersebut antara lain, terjadi kenaikan kinerja di pelayanan kir umum pada tahun 2015 sebesar 67,1% naik menjadi 103% pada tahun 2016, pelayanan kir haji pada tahun 2015 sebesar 65,3% naik menjadi 95,5% pada tahun 2016,

pelayanan ANC BPJS tahun 2015 sebesar 12,3% naik menjadi 50,8%. Terjadi penurunan kinerja di pelayanan pemeriksaan calon pengantin pada tahun 2015 sebesar 93,3% turun menjadi 84,4% pada tahun 2015, pelayanan persalinan umum pada tahun 2015 sebesar 131,3% turun menjadi 85,6% pada tahun 2016.

Hal yang perlu diperhatikan pada tingkat efektivitas dan kinerja di atas terletak pada pelayanan ANC BPJS, pelayanan pemeriksaan calon pengantin, pelayanan persalinan umum. Kenaikan kinerja yang terjadi pada pelayanan ANC BPJS belum sepenuhnya baik dikarenakan tingkat rasio efektivitasnya masih dalam kategori tidak efektif. Selain itu, penurunan rasio efektivitas pada pelayanan pemeriksaan calon pengantin dan pelayanan persalinan umum menunjukkan menurunnya kinerja keuangan pada pelayanan tersebut.

Kinerja BLUD Puskesmas Sukoharjo secara garis besar dikatakan baik dari segi efektivitas bukan hanya ditunjukkan pada kenaikan rasio efektivitas saja akan tetapi dapat dilihat dari bertambahnya pelayanan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2015 pelayanan yang disediakan ada 12 pelayanan sedangkan pada tahun 2016 ada 13 pelayanan yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2016 BLUD Puskesmas Sukoharjo mampu menambahkan satu jenis pelayanan yaitu pelayanan laboratorium BPJS dimana pelayanan tersebut merupakan tambahan pelayanan yang disediakan untuk

pasien hipertensi dan prolans diabetes melitus dalam pengambilan sampel darah yang difasilitasi oleh BPJS. Berikut pelayanan yang dilaksanakan di tahun 2016:

- 1) Pelayanan Umum yang terdiri dari:
 - a) Pelayanan rawat jalan
 - b) Pelayanan kir umum
 - c) Pelayanan kir haji
 - d) Pelayanan pemeriksaan calon pengantin
 - e) Pelayanan pertolongan persalinan normal
 - f) Pelayanan tindakan KB umum
 - g) Pelayanan Tindakan Umum
- 2) Pelayanan BPJS yang terdiri dari:
 - a) Kapitasi BPJS
 - b) Pelayanan pertolongan persalinan normal BPJS
 - c) Pelayanan ANC
 - d) Pelayanan PNC
 - e) Pelayanan Tindakan KB
 - f) Pelayanan Laboratorium

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo kurang ekonomis

Kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo dikatakan kurang ekonomis ditunjukkan oleh hasil perhitungan rasio ekonomis antara lain, pada tahun 2015 rasio ekonomis belanja pegawai sebesar 97,5%, belanja barang dan jasa sebesar 92,5%, belanja modal sebesar 95,2%. Pada tahun 2016 rasio ekonomis belanja pegawai sebesar 99,8%, belanja barang dan jasa sebesar 91,1%, belanja modal sebesar 87,4%. Dari hasil tersebut sesuai kategori rasio ekonomis, keadaan BLUD Puskesmas Sukoharjo dalam realisasi anggaran kurang ekonomis. Namun demikian, kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo dapat dikatakan baik karena 2 (dua) dari 3 (tiga) belanja yaitu belanja barang dan jasa, belanja modal mengalami penurunan tingkat rasio. Hal ini menunjukkan adanya penghematan biaya-biaya yang diperlukan oleh BLUD Puskesmas Sukoharjo.

2. Realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo kurang efisien

Kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo dikatakan kurang efisien ditunjukkan oleh hasil perhitungan rasio efisien yaitu pada tahun 2015 sebesar 89,1% dan pada 2016 sebesar 96,2%. Bertambahnya rasio efisiensi

menunjukkan kurang efisiensi dalam realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo.

3. Realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo sangat efektif

Kinerja keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo secara garis besar dikatakan sangat efektif ditunjukkan oleh hasil perhitungan rasio efektivitas yaitu pada tahun 2015 sebesar 104,8% dan pada tahun 2016 sebesar 107,1%. Hasil tersebut menunjukkan realisasi anggaran terhadap target yang ditetapkan sudah sangat efektif dengan pencapaian di atas 100%. Namun demikian, jika dilihat per pelayanan, masih terdapat rasio efektivitas yang kurang efektif bahkan tidak efektif, pada tahun 2015 pelayanan kir umum sebesar 67,1%, pelayanan kir haji sebesar 65,3%, dan pelayanan ANC BPJS sebesar 12,3%. Pada tahun 2016, pelayanan pemeriksaan calon pengantin sebesar 84,4%, pelayanan persalinan umum sebesar 85,6%, pelayanan ANC BPJS sebesar 50,8%.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen BLUD Puskesmas Sukoharjo

- a. Realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo kurang ekonomis
Realisasi anggaran kurang ekonomis terjadi pada belanja pegawai. Manajemen agar mampu memperhitungkan jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan beban kerja dan standar ketenagaan sesuai peraturan

yang berlaku agar mampu melakukan penghematan biaya-biaya sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu perlu dibuat skala prioritas pengeluaran agar anggaran yang terserap sesuai dengan kebutuhan.

b. Realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo kurang efisien

Dilakukannya analisis sumber-sumber pendapatan puskesmas agar bisa dianalisis pengeluaran demi menghasilkan pendapatan tersebut sehingga pengeluaran yang tidak diperlukan untuk menghasilkan pendapatan bisa diminimalisir. Diharapkan BLUD Puskesmas Sukoharjo mampu meminimalkan pengeluaran namun mampu memaksimalkan pendapatan.

c. Realisasi anggaran di BLUD Puskesmas Sukoharjo kurang efektif

Mempertahankan capaian efektivitas yang sudah baik dan meningkatkan kinerja pada pelayanan kir umum, pelayanan kir haji, pelayanan pemeriksaan calon pengantin, pelayanan persalinan umum. Terutama pada pelayanan ANC BPJS yang belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang baik.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

a. Apabila ada peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian yang hampir sama, sebaiknya mengambil sampel yang lebih luas, agar generalisasi dapat dilakukan dengan baik.

b. Selain rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas yang dijadikan patokan penilaian kinerja dalam penelitian ini, peneliti

menyarankan rasio lain sebagai pendukung ketiga rasio tersebut seperti rasio kemandirian dan rasio keadilan.

- c. Penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk menganalisa strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan khususnya di BLUD Puskesmas Sukoharjo dan BLUD Puskesmas di Kabupaten Wonosobo pada umumnya.
- d. Penambahan jangka waktu pengambilan data agar hasil analisis lebih bervariasi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Demi Aulia Arfan. (2014). “Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”.*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Francisca Erni.D.P. (2010) “Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Puskesmas, Studi pada Puskesmas Danurejan I Yogyakarta”*Skripsi*”. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Kepmenkes RI no, 128/Menkes/SK/II/2004. (2004). *Kebijakan Dasar Puskesmas*. Jakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Muhamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mufti Anas. (2009). “Analisis Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Tahun 2008”*Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Sebelas Maret
- Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sukoharjo
- Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 06 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Rencana Strategis Bisnis BLUD Puskesmas Sukoharjo Tahun 2015-2019
- Setiawan, Ngadirin. (2011). *Penganggaran Bisnis (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: FISE UNY
- Sugiyono (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan Bupati Nomor - Tahun 2014 tentang Penetapan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Ulum, Ihyaul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Wikipedia Indonesia (2016). *Organisasi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi> [diakses 01 Januari 2017]